

Pengaruh Kemandirian, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer Terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera

Mardiana Ayu Lestari, Kartika Rachma Sari, Sukmini Hartati

Politeknik Negeri Sriwijaya

mardianaayulestari48110@gmail.com, kartikasyahrul@polsri.ac.id,

sukmini_hartati@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study was conducted to examine the factors affecting financial sustainability in provincial governments in Sumatra. The study was measured using data from the Local Government Financial Reports (LKPD) for the period 2019-2023. This study is a quantitative study. The population used in this study consisted of 10 provinces in Sumatra. Sampling was conducted using saturated sampling techniques. Data collection techniques used documentation. Data sources utilized secondary data. Data analysis methods employed panel data multiple regression analysis. The results of this study can be concluded that, partially, the variables of Financial Independence, Regional Financial Efficiency, and Transfer Funds have a significant impact on financial sustainability. Additionally, simultaneously, Financial Independence, Regional Financial Efficiency, and Transfer Funds have a significant impact on financial sustainability in provincial governments in Sumatra.

Keywords: *Financial Sustainability, Financial Independence, Regional Financial Efficiency, Transfer Funds*

ABSTRAK

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *financial sustainability* pada pemerintah provinsi di Sumatera. Penelitian ini diukur menggunakan data unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2019-2023. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari 10 Provinsi di Sumatera. Dengan menggunakan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda data panel. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer berpengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability*. Serta secara simultan Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer berpengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera.

Kata kunci: *Financial Sustainability, Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, Dana Transfer*

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia yang mengakhiri era Orde Baru pada akhir 1990-an, berdampak besar pada pengelolaan keuangan publik yaitu salah satunya menghasilkan otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri pertama kali dilaksanakan melalui ditetapkannya Undang Undang RI No. 22, Tahun (1999) tentang Pemerintahan Daerah yang hingga kini mengalami banyak perubahan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah provinsi/daerah/kabupaten atau kota yang memiliki otonomi dianggap memiliki lebih banyak pengetahuan tentang kebutuhan wilayahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sehingga, pemerintah daerah dapat membuat keputusan untuk melayani masyarakatnya dengan cepat dan efisien tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat. Khususnya dalam hal ini pemerintah daerah juga bertanggung jawab memberikan layanan publik dengan mempertimbangkan kondisi keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan tidak menambah beban ke masyarakat (Wardhani & Payamta, 2020). Stabilitas fiskal menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui seberapa baik suatu daerah mengelola sumber dayanya secara berkelanjutan dan efektif.

Untuk mewujudkan *financial sustainability*, pemerintah daerah perlu menerapkan beberapa strategi penting. Pertama, meningkatkan kemandirian keuangan dengan cara mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Mahmudi, 2019). Kedua, pemerintah harus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dengan mengurangi pemborosan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran untuk pelayanan publik dan pembangunan (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Ketiga, perlu dilakukan pengelolaan dana transfer secara bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan yang justru dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal dan kemandirian fiskal (Maghfiroh et al., 2023). Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pemerintah daerah dapat menjaga keseimbangan anggaran, meminimalkan risiko defisit, dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat (Nurkhayati, 2022).

Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) merupakan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk operasional dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Sebagaimana dilaporkan oleh *finansial.bisnis.com*, keuangan berkelanjutan adalah salah satu dari enam isu utama bidang keuangan Presiden G20, karena sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mendorong pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan (Nababan & Shahrullah, 2022)

Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan melalui optimalisasi PAD, efisiensi belanja, dan ketergantungan pada transfer pusat (Nurkhayati, 2022). Namun, defisit operasional akan terjadi jika tanggungan dan pinjaman pemerintah daerah melebihi pendapatan (Wardhani & Payamta, 2020). Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan ini adalah surplus/defisit laporan operasional. Gambar 1.1 menunjukkan rasio surplus/defisit laporan operasional pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023:



Gambar 1. Grafik Rasio Surplus/Defisit Laporan Operasional Provinsi di Sumatera TA 2019-2023

Sumber: BPK RI, Data diolah (2025)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa beberapa provinsi di Sumatera mengalami fluktuasi signifikan dalam rasio surplus/defisit Laporan Operasional selama tahun 2019 hingga 2023. Beberapa provinsi tersebut mengalami surplus yang tinggi, seperti Provinsi Sumatera Selatan yang mencatat surplus sangat tinggi sebesar 786,36% pada 2019, namun turun drastis menjadi hanya 3,69% pada 2020 dan bahkan mengalami defisit sebesar -92,15% pada 2021 sebelum kembali mencatat surplus di tahun-tahun berikutnya. Provinsi Riau juga menunjukkan pola fluktuasi tajam, di mana pada 2019 mencatat surplus sebesar 149,13%, kemudian mengalami defisit -35,64% pada tahun 2020, dan kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai surplus sebesar 1006,59% pada tahun 2023. Di sisi lain, terdapat pula provinsi yang mengalami defisit besar dalam beberapa tahun. Provinsi Sumatera Barat sendiri mencatat defisit yang sangat dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -354,58%, sedangkan Lampung mengalami defisit sebesar -255,48% pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan tekanan fiskal yang cukup berat pada masa tersebut. Secara umum, meskipun terdapat peningkatan signifikan pada beberapa tahun terakhir di sebagian provinsi, kondisi ini tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa

provinsi seperti Jambi dan Bengkulu tampak mulai menunjukkan pemulihan setelah mencatat defisit pada tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pengelolaan keuangan daerah di wilayah Sumatera yang berdampak pada keberlanjutan fiskal. Fluktuasi yang tajam menandakan belum stabilnya kinerja fiskal di sejumlah provinsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan stabilitas fiskal dalam jangka panjang, diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Strategi ini harus memahami faktor-faktor yang dapat membuat keputusan terbaik untuk meningkatkan layanan masyarakat dan mencapai pembangunan yang lebih baik.

Salah satu faktor yang memengaruhi *financial sustainability* adalah kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan lokal. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Menurut Wardhani & Payamta (2020), kemandirian merupakan fondasi penting bagi *financial sustainability* karena menunjukkan bahwa daerah tidak bergantung secara berlebihan pada bantuan pemerintah pusat. Namun, hasil penelitian menunjukkan temuan yang beragam, seperti yang dilaporkan oleh Syahriyal et al., (2023) yang menyatakan bahwa kemandirian tidak selalu berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*, tergantung pada kapasitas dan efektivitas manajemen keuangan daerah.

Faktor kedua yaitu efisiensi keuangan daerah, yang menggambarkan seberapa optimal pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Efisiensi dapat diukur melalui rasio antara pendapatan dan belanja daerah. Tingkat efisiensi yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang optimal dalam memanfaatkan sumber daya finansialnya, sehingga berpotensi mengurangi kemampuan daerah untuk mencapai *financial sustainability*. Oleh karena itu, untuk mencapai keuangan keberlanjutan, peningkatan efisiensi sangat penting. Karena pinjaman tinggi, pemerintah daerah cenderung kurang efektif. Ini karena pendapatan lebih banyak digunakan untuk membayar utang daripada membiayai pembangunan dan layanan publik (Lhutfi & Sugiharti, 2022). Seperti yang diungkapkan oleh Mahmudi, (2019), efisiensi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah, terutama dalam konteks penggunaan dana untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, dana transfer berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 selain PAD terdapat sumber lain untuk menentukan keberlanjutan fiskal yaitu transfer dana pemerintahan. Dana transfer berasal dari APBN yang dikirim ke daerah untuk mensubsidi kebutuhan daerah serta mengurangi kesenjangan sumber pembiayaan antar pemerintah pusat dan daerah. Meskipun dana transfer merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak daerah, ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer dapat mengurangi insentif daerah untuk meningkatkan PAD, serta menciptakan risiko ketidakstabilan fiskal dalam jangka panjang (Maghfiroh et al., 2023; Pambudi & Meini, 2023). Namun, penelitian Ichsan et al. (2025) menunjukkan bahwa dana transfer memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial*

sustainability, terutama jika digunakan secara tepat dan efektif dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Penelitian sebelumnya mengenai *financial sustainability* di Indonesia juga memberikan hasil yang beragam. Lhutfi & Sugiharti (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap *financial sustainability*. Lalu hasil penelitian Aryasi et al., (2023) juga menyimpulkan bahwa kemandirian dan efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, sementara Syahriyal et al., (2023) menyatakan kemandirian tidak berpengaruh terhadap *financial sustainability*. Selain itu, penelitian yang dilakukan Ichsan et al., (2025) menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa hal. Pertama, fokus penelitian ini adalah pada pemerintah provinsi di Sumatera, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak pada tingkat kabupaten/kota. Kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih terbatas dan belum menguji indikator fiskal secara komprehensif, terutama variabel dana transfer terhadap *financial sustainability* yang baru sedikit diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan variabel dana transfer sebagai kontribusi baru, sesuai dengan temuan Ichsan et al. (2025) yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah adalah dana transfer dari pemerintah pusat dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan yang kemungkinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan keuangan, dilihat dari besarnya anggaran transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Besarnya anggaran transfer dibandingkan dengan PAD memiliki implikasi signifikan terhadap keberlanjutan keuangan daerah. Menurut Maghfiroh et al., (2023); Pambudi & Meini, (2023) menyebutkan bahwa dana transfer berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah, namun di sisi lain dapat menghambat kemandirian fiskal suatu daerah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemandirian, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer Terhadap *Financial Sustainability* Pada Pemerintah Provinsi di Sumatera”.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2017), penelitian menurut metode ada 3 yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif dan metode kombinasi (*mixed methods*). Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:23) menyatakan “Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dengan skala

pengukuran adalah skala rasio. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Sustainability* pada 10 Provinsi di Sumatera dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh melalui situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di <https://e-ppid.bpk.go.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap *Financial Sustainability*

Kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana suatu pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri, tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kemandirian ini diukur melalui rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Menurut Ritonga (2014), peningkatan kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi fiskalnya secara efektif dan efisien, serta menunjukkan kualitas tata kelola keuangan yang baik.

Hasil analisis regresi linier berganda dan uji parsial (*uji t*) menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial sustainability* pada pemerintah provinsi di Sumatera selama periode 2019–2023. Nilai *t* hitung sebesar $-2,555766 < \text{dari } -t \text{ tabel } -1,67866$ dan nilai signifikansi $0,0148 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_1) diterima, yang berarti bahwa kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan fiskal (*financial sustainability*). Temuan ini sesuai dengan teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) oleh Locke & Latham (2002), yang menekankan bahwa organisasi yang memiliki tujuan keuangan yang jelas, seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan lebih terarah dan termotivasi dalam mengelola anggaran secara mandiri. Semakin tinggi proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan pada pusat.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Wardhani & Payamta (2020) serta Lhutfi & Sugiharti (2022) yang menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan fondasi penting dalam mencapai keberlanjutan fiskal. Penelitian Aryasi et al. (2023) juga mendukung temuan ini, di mana kemandirian keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal di daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah daerah yang mampu meningkatkan PAD akan lebih siap dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya secara berkelanjutan.

Pengaruh Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap *Financial Sustainability*

Efisiensi keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya keuangannya secara hemat, efektif, dan tepat sasaran. Rasio efisiensi dihitung dengan membandingkan total belanja operasional terhadap total pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi

(mendekati 0%), maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah, karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang optimal dengan pengeluaran yang lebih rendah. Dengan kata lain, rasio efisiensi yang rendah menunjukkan pengelolaan anggaran yang semakin baik.

Hasil pengujian regresi linier berganda dan uji parsial (*uji t*) menunjukkan bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap *financial sustainability*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t hitung* sebesar 2,519512 > dari *t tabel* sebesar 1,99006, serta nilai signifikansi sebesar 0,0162 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_2) diterima. Artinya, efisiensi keuangan daerah secara signifikan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal (*financial sustainability*) pada pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah yang mampu menjaga tingkat efisiensinya pada level rendah (mendekati 0%) menunjukkan adanya kemampuan dalam mengendalikan belanja operasional serta mengarahkan sumber daya ke arah belanja produktif.

Dalam konteks *Goal Setting Theory*, pencapaian efisiensi keuangan mencerminkan keberhasilan organisasi dalam menetapkan tujuan fiskal yang spesifik, realistis, dan terukur. Locke dan Latham menyatakan bahwa tujuan yang menantang namun jelas dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Ketika pemerintah daerah menetapkan target efisiensi keuangan yang konkret, misalnya menurunkan rasio efisiensi dari tahun ke tahun, hal ini mendorong adanya strategi pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan fokus. Komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut menjadi kunci dalam mendorong pencapaian *financial sustainability* secara konsisten.

Penemuan ini sesuai dengan pendapat Ritonga & Putri (2019), yang menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan anggaran akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, terutama dalam konteks pengendalian biaya pegawai dan peningkatan belanja publik. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian Aryasi et al. (2023) dan Khairunisa et al. (2024) yang menemukan bahwa efisiensi berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan keuangan. Oleh karena itu, daerah yang mengelola belanjanya secara efisien dapat memperkuat kapasitas fiskalnya untuk mendukung pembangunan jangka panjang.

Pengaruh Dana Transfer Terhadap *Financial Sustainability*

Dana transfer dari pemerintah pusat, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah serta membantu pembiayaan pelayanan publik yang merata dan berkelanjutan. Ketergantungan terhadap dana transfer umumnya lebih tinggi pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dan uji parsial (*uji t*), diperoleh bahwa nilai *t hitung* sebesar 4,640171 lebih besar dari *t tabel* sebesar 1,99006, dengan nilai signifikansi sebesar 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif

(H_3) diterima. Artinya, secara statistik, dana transfer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial sustainability* pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023. Hal ini mengindikasikan bahwa dana transfer berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan fiskal daerah. Pemerintah daerah yang menerima dana transfer dalam jumlah besar memiliki ruang fiskal lebih luas untuk mendanai kegiatan operasional, pembangunan infrastruktur, serta program-program pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberlanjutan fiskal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas fiskal internal seperti PAD, tetapi juga ditopang oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan dana transfer secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan.

Dalam perspektif *Goal Setting Theory*, penggunaan dana transfer yang efektif sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan penetapan tujuan pengelolaan anggaran. Locke dan Latham menegaskan bahwa tujuan yang spesifik, menantang, dan realistis dapat meningkatkan motivasi dan kinerja organisasi. Jika pemerintah daerah menetapkan sasaran penggunaan dana transfer yang terukur seperti meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, atau pembangunan infrastruktur dasar dan mengaitkannya dengan indikator hasil yang jelas, maka pengelolaan dana transfer akan lebih optimal dan berkontribusi secara signifikan terhadap *financial sustainability*.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Ichsan et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa dana transfer berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan fiskal, terutama pada daerah dengan PAD yang terbatas. Selain itu, Maghfiroh et al. (2023) dan Pambudi & Meini (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian, penting bagi daerah untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada dana transfer agar tidak menghambat kemandirian fiskal.

Pengaruh Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Dana Transfer Terhadap *Financial Sustainability*

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji F), hubungan variabel Kemandirian Keuangan (X_1), Efisiensi Keuangan Daerah (X_2), dan Dana Transfer (X_3) berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap *Financial Sustainability* (Y). Sehingga hasil penelitian ini sependapat dengan hipotesis alternatif dalam penelitian dan menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel tersebut memainkan peran penting dalam mewujudkan keberlanjutan fiskal pemerintah daerah.

Dengan kata lain, apabila pemerintah daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangan, mengelola anggaran secara efisien dengan menekan belanja pegawai, serta mengalokasikan dana transfer secara optimal untuk mendukung pelayanan publik, maka hal tersebut akan memperkuat posisi fiskal daerah. Selain itu, kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan untuk memenuhi kewajiban seperti pembayaran utang, juga mencerminkan kinerja keuangan yang

baik. Kondisi tersebut secara simultan berkontribusi pada tercapainya *financial sustainability* pemerintah provinsi di Sumatera selama tahun anggaran 2019–2023, yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan melakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023. Dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Kemandirian Keuangan (X_1) berpengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023, sehingga sesuai dengan hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa dengan tingginya tingkat kemandirian keuangan, maka pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya yang memiliki potensi sebagai pendanaan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat secara berkelanjutan.
2. Variabel Efisiensi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability* sehingga sesuai dengan hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa dengan meminimalkan belanja pegawai yang biasa merupakan belanja yang mendominasi belanja daerah, untuk lebih difokuskan dalam pembiayaan belanja modal dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dapat mendorong tercapainya *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023.
3. Variabel Dana Transfer (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019-2023. Hal ini membuktikan bahwa dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki peranan penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, dana transfer mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah, membantu pembiayaan program prioritas pembangunan, serta menjaga kesinambungan pelayanan publik, khususnya bagi daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak positif terhadap pencapaian *financial sustainability* pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019–2023.
4. Variabel Kemandirian Keuangan (X_1), Efisiensi Keuangan Daerah (X_2), dan Dana Transfer (X_3) berpengaruh dan signifikan secara bersama-sama (silmultan) terhadap *Financial Sustainability* (Y). Sehingga sesuai dengan hipotesis alternatif dalam penelitian ini. Maka, dapat memungkink

terwujudnya keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*) pada Pemerintah Provinsi di Sumatera tahun anggaran 2019–2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2023). Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021. *Resmilitaris*, 13(1), 758-767.
- Andrew, & Cohen, A. D. (2004). *Studying Speaking to Inform Second Language Learning*. Multilingual Matters.
- Arpani, W. N., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373–2390. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218>
- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(2), 544–555.
- Bolívar, M. P. R., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the Accounting Measurement of Financial Sustainability in Local Governments Through Political Factors. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>
- Ernawati, & Prasetya, B. P. (2024). Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta. *E- Journal Pustaka Kesehatan*, 7(2), 76–81.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ichsan, H., Am, A. M., Novitasari, E., & Aulia, A. (2025). The Effect of Transfer Funds and Intellectual Capital on Local Government Financial Sustainability. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(2), 326–336.
- Khairunisa, D. R., Saftiana, Y., & Sari, R. (2024). Pengaruh Kemandirian dan Efisiensi Keuangan Daerah Terhadap Keberlanjutan Keuangan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 3(2), 121–154.
- Kuncoro, M., & Hardani, W. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi : Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?* Jakarta: Erlangga.
- Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. *Financial Sustainability of Local Governments in Southern Africa*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.4324/9781003498230>

- Locke, E. A. (1968). Toward a theory of Task Motivation and Incentives. *Organizational Behavior and Human Performance*, 3(2), 157–189. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0030-5073\(68\)90004-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4)
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35-year Odyssey. In *American Psychologist* (Vol. 57, Issue 9, pp. 705–717). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.57.9.705>
- Maghfiroh, F. M., Natalina, S. A., & ... (2023). The Concept of Collaboration of the Triple Bottom Line Method in Measuring the Implementation of Green Accounting and Corporate Social Responsibility (CSR) in the MSME Industry. *Proceedings of Islamic Economic Business and Philanthropy*, 2(2), 121–154.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Miftahurrohman, A., & Putra Prasetya, B. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan (Financial Sustainability) Pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 7(2), 363–372. <https://doi.org/10.36815/bisman.v7i2.3259>
- Nababan, J., & Shahrullah, R. (2022). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(5), 108. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>
- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. (2020). Susustainable Finance Portofolio Analysis in Islamic Bank (Segment Perspective). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 226–240.
- Nurkhayati, E. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sukoharjo. *JABE (Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi)*, 11(2), 593–600. <http://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/view/60%0Ahttps://jurnal.stas.ac.id/index.php/jabe/article/download/60/40>
- Pambudi, S. G., & Meini, Z. (2023). The Effects Of Profitability, Liquidity And Firm Size On Firm Value, With Sustainability Report As The Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*.
- Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, F., & Putri, D. (2019). Debt Default Dan Financial Distress Sebagai Determinan Penerimaan Opini Audit Going Concern. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 11(1), 1–32.

<https://doi.org/10.37151/jsma.v11i1.22>

- Rohmadani, D. S., Yulsiati, H., & Sari, Y. (2024). Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Rasio Utang terhadap Keberlanjutan Finansial pada Provinsi di Indonesia. *Management Ekonomi Dan Bisnis*, 13(3), 674–681.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Dprd Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi Jambi*, 2(1), 1-9.
- Sari, C. P., & Novyarni, N. (2020). The Influence Of Tunneling Incentive, Tax Minimazation and Bonus Mechanism Effect On The Company Decision to Transfer Pricing (Manufacturing Companies Listed On The Indonesia Stock). *Journal Visioner : Journal Of Television*, 2(5), 1–21. www.idx.co.id.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahriyal, S., Abdullah, S., & Meutia, R. (2023). What Determines Financial Sustainability in Local Government? Evidence from Aceh Province, Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(3), 261–274. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v8i3.3106>
- Undang-Undang No. 1. (2022). Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Undang-Undang Nomor 23. (2014). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah* (Vol. 8, Issue 33).
- Undang-Undang Nomor 1. (2022). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang Undang RI No. 22. (1999). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. 7(3), 213–221.
- UU No. 33. (2004). Undang Undang (UU) No 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 30(8), 2221.
- Wardani, A. K., & Lutfi, L. (2019). Pengaruh literasi keuangan, experienced regret, risk tolerance, dan motivasi pada keputusan investasi keluarga dalam perspektif masyarakat Bali. *Journal of Business & Banking*, 6(2), 195–214. <https://doi.org/10.14414/jbb.v6i2.996>
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>